

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sekiranya biayanya dapat dikendalikan serta kualitasnya dapat membantu masyarakat (Rindi Aldila Arianto, 2017). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sementara itu, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat dan memiliki fungsi sebagai kontak pertama dari peserta BPJS Kesehatan sehingga berdampak besar bagi peningkatan status kesehatan masyarakat (Mujiati, M., 2016). Puskesmas termasuk pelayanan kesehatan tingkat pertama di era JKN yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. Tentunya, puskesmas memegang peranan paling penting dalam suksesnya pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Tingkat pemanfaatan pelayanan puskesmas oleh masyarakat di Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat antara lain pada tingkat pemanfaatan puskesmas pada tahun 2012 sebesar 12,0%, pemanfaatan puskesmas 4,5%, dan poskesdes atau polindes 1,5%. Banyak faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan (Khopsoh & Suharto, 2016). Menurut teori Health Service Use dari Andersen (1975) pemanfaatan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor *predisposisi*, karakteristik kemampuan dan karakteristik kebutuhan. Setiap faktor tersebut kemungkinan berpengaruh sehingga dapat untuk memprediksi pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2018), Jawa Timur memiliki 960 puskesmas yang dikelompokkan berdasarkan wilayahnya, puskesmas tersebut tersebar di 76 kabupaten atau kota. Khususnya di Kabupaten Trenggalek, terdapat 22 puskesmas yang tersebar di Kecamatan Panggul, Munjungan, Dongko, Kampak, Gandusari, Watulimo, Suruh, Pule, Karang, Bendungan, Tugu, Trenggalek, Pogalan, dan Durenan. Pada tahun 2017 di Kabupaten Trenggalek jumlah kunjungan pasien di Puskesmas terbagi menjadi dua, yaitu pada unit rawat jalan dan rawat inap. Jumlah kunjungan pasien pada unit rawat jalan di Puskesmas sejumlah 191.678 kunjungan sedangkan pada unit rawat inap 17.768 kunjungan pasien. Sementara itu, pada Tahun 2017 jumlah masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjumlah 393.598 jiwa yang terdiri atas Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik APBN maupun APBD, Pekerja Penerima upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri, Bukan Pekerja (BP) dan Jamkesda. Pada tahun 2017 ini pula telah dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, warga miskin yang didaftarkan sebagai peserta JKN sebanyak 11.740 jiwa (Teguh, S., 2017).

Puskesmas Dongko merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Data yang diperoleh di bagian rekam medik Puskesmas Dongko tahun 2020 menunjukkan bahwa angka kunjungan puskesmas sejumlah 12.285 kunjungan yang terbagi menjadi 2 yaitu 5.827 kunjungan peserta JKN dan 6.458 kunjungan bayar mandiri. Dapat diartikan bahwa angka kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dongko oleh peserta JKN lebih rendah daripada angka kunjungan bayar mandiri.

Sementara itu, menurut data statistik Pemerintah Kecamatan Dongko kondisi masyarakat Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan berada pada penghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan peserta JKN-KIS terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Apakah terdapat hubungan antara hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan peserta JKN-KIS terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dongko Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan peserta JKN-KIS terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dongko Trenggalek.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dongko berdasarkan tingkat pendidikan peserta JKN-KIS di Wilayah Kerja Puskesmas Dongko
2. Mengetahui tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dongko berdasarkan tingkat pendapatan peserta JKN-KIS di Wilayah Kerja Puskesmas Dongko
3. Mengetahui hubungan pendidikan peserta JKN-KIS di Wilayah Kerja Puskesmas Dongko dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dongko
4. Mengetahui hubungan pendapatan peserta JKN-KIS di Wilayah Kerja Puskesmas Dongko dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Dongko

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan ilmu yang relevan dalam pembelajaran di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang khususnya pada Prodi D3 Asuransi Kesehatan.

- b. Bagi Puskesmas Dongko

Sebagai masukan kepada pihak Puskesmas Dongko dalam menyusun rencana strategis, sehingga akan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

- c. Bagi Peneliti

Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas.